



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSRAM
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 426242

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.065.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/108 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 6000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 10350 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 8000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 8500 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
6. Tanah Seluas 13000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah Seluas 3000 m2 di LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 40.000.000
8. Tanah Seluas 7000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 300 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
10. Tanah Seluas 10000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
11. Tanah Seluas 7000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



12. Tanah Seluas 10000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 129.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 329.626.913

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.532.126.913

III. HUTANG Rp. 362.441.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.169.685.913

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.